

Kinerja bursa kerja khusus dalam menyalurkan lulusan SMK negeri di kota Cimahi

Titin¹, Aan Komariah², Nani Hartini³

¹²³Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

*Correspondence: E-mail: titin@upi.edu

ABSTRACT

This research, titled "Performance of Specialized Work Exchange in Channeling Graduates of State Vocational Schools in Cimahi City," aims to describe the implementation, performance, and the factors influencing the effectiveness of Specialized Work Exchange (BKK) in facilitating job placements for vocational school graduates. Using qualitative methods, data were collected through interviews, documentation studies, and observations involving BKK leaders and school graduates. The findings indicate that BKK acts as a mediator between job seekers and industries, conducting activities such as industry collaboration, job seeker data collection, career guidance, recruitment, job fairs, and alumni tracking. While BKK in Cimahi City has fulfilled legal requirements and carried out several programs effectively, areas such as organizational structure, infrastructure, and consistent implementation of tracer studies and job fairs require improvement. Challenges include limited human resources, insufficient funding, and difficulties in establishing industry partnerships. However, support from school stakeholders, alumni, and the alignment of study programs with industry needs serve as significant enablers. In conclusion, while BKK's performance is commendable, successfully placing 53% of graduates, further improvements are needed to enhance its effectiveness and efficiency in connecting graduates with employment opportunities.

Penelitian berjudul "Kinerja Bursa Kerja Khusus Dalam Menyalurkan Lulusan SMK Negeri di Kota Cimahi" bertujuan menggambarkan pelaksanaan, kinerja, serta faktor pendukung dan penghambat Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam menyalurkan lulusan SMK Negeri di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi terhadap Ketua BKK dan lulusan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKK berfungsi sebagai perantara antara pencari kerja dan industri melalui kegiatan seperti kerjasama industri, pendataan pencari kerja, bimbingan karir, rekrutmen, job fair, dan penelusuran alumni. Meski telah memenuhi legalitas dan menjalankan program dengan baik, aspek seperti struktur organisasi, sarana prasarana, dan konsistensi kegiatan seperti tracer study dan job fair perlu ditingkatkan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan mitra industri, sedangkan dukungan dari stakeholder sekolah, alumni, dan keselarasan program studi menjadi faktor pendukung penting. Kesimpulannya, kinerja BKK cukup baik dengan 53% lulusan berhasil disalurkan, namun masih diperlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran lulusan ke dunia kerja. © 2024 Jurnal Tata Kelola Pendidikan

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received: 30 Juli 2024

First Revised: 20 Agustus 2024

Accepted: 28 Sept 2024

First Available online: 1 Okt 2024

Publication Date: 1 Okt 2024

Keyword: Performance, Special Job Fair, Graduates.

Kata Kunci: Kinerja, Bursa Kerja Khusus, Lulusan

1. PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan menjadi isu bisnis dan perekonomian di Indonesia yang penting, karena tingginya jumlah pengangguran menunjukkan ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Suharnanik. 2023, hlm.8). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang tidak bekerja dan sedang mempersiapkan diri untuk berusaha, serta penduduk yang tidak bekerja, tidak sedang mencari pekerjaan, dan didefinisikan sebagai mereka yang akan bekerja. bekerja. karena merasa tidak mungkin menjangkau mereka yang sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja, maka kata pengangguran disebut dengan pengangguran terbuka.

Beberapa aspek penyebab pengangguran terbuka yakni minimnya ilmu serta Keterampilan bagi pencari kerja yang dibutuhkan oleh organisasi dan dunia usaha. Semakin kompetitifnya dunia kerja, maka semakin banyak pula kebutuhan masyarakat untuk membekali diri dengan keterampilan dan kemampuan agar dapat bersaing dengan orang lain. Dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu membangun jaringan kerja yang kokoh, bekerja sama dalam tim yang kuat, serta memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas kerja. Selain itu, mereka juga harus memiliki kecenderungan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kualitas diri.

Pendidikan merupakan upaya untuk menjamin sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan terampil. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari segi keterampilan, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa pendidikan bangsa berfungsi untuk mengembangkan keterampilan dan menciptakan watak dan dunia manusia yang bertanggung jawab demi kemajuan bangsa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan peserta didik menjadi manusia yang religius, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang tinggi, sehat, cerdas, kuat, kreatif, warga negara yang mandiri, demokratis, dan berwibawa.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran penting dalam Sistem Pendidikan Nasional. Kegiatan sekolah menengah sangat penting bagi penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik fisik maupun mental. Sekolah kejuruan adalah sekolah menengah yang mempersiapkan siswanya untuk mempersiapkan pekerjaan di bidang tertentu. Menurut Undang-Undang Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 Bab 26 yang mengubah Undang-Undang Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, tujuan utama lulusan sekolah teknik dan lulusan sekolah kejuruan adalah: (1) mempersiapkan peserta didik menjadi anggota sejati. masyarakat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. dan bermartabat; (2) membina manusia berdasarkan sila Pancasila; dan (3) mengembangkan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan siswa agar mandiri dan menempuh pendidikan sesuai dengan tujuan akademiknya.

Oleh karena itu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang untuk mendidik dan mempersiapkan calon pekerja tingkat menengah agar siap memasuki dan menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI) (Rakhman & Trihantoyo, 2020. hlm 200). Harapan tersebut tampaknya belum terwujud, mengingat masih banyaknya siswa yang belum

memasuki dunia kerja. Hal ini terlihat dari informasi pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang diselesaikan di Jawa Barat.

Dari data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui TPT kelompok lulusan SMK pada Februari dan Agustus 2019-2022 masih rendah dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya keterserapan kerja atau penyaluran lulusan SMK yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan dan hasil yang didapatkan dari pendidikan kejuruan.

Kota Cimahi menduduki peringkat pertama dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Jawa Barat tahun 2023 yaitu sebesar 10,52 persen atau sebanyak 33.192 jiwa. Pada dasarnya angka tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yakni pada tahun 2022, TPT mencapai 10,77 persen, sedangkan pada tahun 2021, angka tersebut mencapai 13,07 persen.

Dilansir dari limawaktu.id ditanggal 01 Desember 2023, usai membuka Job Fair 2023, Sekda Kota Cimahi Dikdik S Nugrahawan mengungkapkan bahwa banyak hambatan dalam penanganan pengangguran mulai dari kompetensi belum memenuhi kebutuhan perusahaan, terbatasnya lapangan kerja karena banyaknya perusahaan yang berhenti beroperasi akibat pandemi, serta kurangnya akses masyarakat terhadap informasi pasar kerja (Munawar, Bubun. 2023). Salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengangguran, khususnya di tingkat SMK adalah dengan mengembangkan lembaga ketenagakerjaan dalam dunia pendidikan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga kerja, Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah satuan pelayanan pada lembaga sekolah menengah, lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memfasilitasi penempatan tenaga kerja bagi lulusannya. BKK juga merupakan lembaga yang dibentuk sebagai mitra Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi dan layanan kerja, mengelola pemasaran, distribusi, dan penempatan tenaga kerja (Direktorat Pembinaan, 2018).

Pada umumnya, BKK sebagai organisasi publik yang didirikan di satuan pendidikan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: menghubungkan lulusan dan Dunia Usaha/Industri yang membutuhkan karyawan; memperkuat hubungan antara SMK dan Dunia Usaha/Industri; memberikan layanan bimbingan bagi siswa yang masih belajar atau sudah lulus; memperluas pengetahuan peserta didik/lulusan SMK mengenai peluang kerja di dunia usaha/industri; serta menjadi wadah untuk menampilkan prestasi SMK dalam penempatan lulusannya di dunia kerja.

Mengacu pada tingginya tingkat pengangguran di Kota Cimahi selama tiga tahun terakhir yang didominasi oleh lulusan SMK, BKK di setiap SMK di Kota Cimahi memiliki peran penting dalam memasarkan lulusannya ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Pengelolaan BKK SMK yang optimal akan memberikan manfaat positif baik bagi peserta didik maupun alumni. Hal ini sejalan dengan visi dan misi organisasi BKK untuk menjadi lembaga pelayanan yang berkualitas, menjembatani lulusan dengan pemberi kerja, serta mempersiapkan SDM lulusan dengan kemampuan dan keterampilan yang unggul untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, BKK

bertujuan untuk memperluas kerjasama dan meningkatkan jumlah lulusan SMK yang terserap ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Melihat urgensi tersebut perlu diadakannya penelitian untuk mengetahui kinerja BKK. Penilaian kinerja adalah aspek penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan atau organisasi untuk menilai keberhasilan strategi yang diterapkan. Penilaian kinerja menjadi salah satu faktor utama bagi organisasi karena hasil evaluasi kinerja dapat dijadikan bahan evaluasi dan indikator untuk memantau efektivitas strategi kinerja yang diterapkan oleh suatu organisasi (Anggraini, A. M, dkk. 2020, hml 59). Bagi organisasi sektor publik seperti BKK, penilaian kinerja adalah aktivitas yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana organisasi berhasil mencapai misinya. Informasi kinerja penting untuk menilai sejauh mana layanan yang diberikan suatu organisasi dapat memenuhi harapan dan kepuasan pengguna layanan Melalui evaluasi kinerja, upaya perbaikan dapat dilakukan secara bermakna dan sistematis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini fokus pada eksplorasi dan pemahaman makna perilaku individu dan kelompok, serta menggambarkan masalah sosial atau isu kemanusiaan. Proses penelitian meliputi penyusunan pertanyaan penelitian dan prosedur awal, pengumpulan data dari partisipan, analisis data secara induktif, penyusunan tema dari data parsial, dan interpretasi makna data. Langkah terakhir adalah menyusun laporan dengan struktur yang fleksibel.

Dalam penelitian ini, partisipan adalah individu yang menyediakan data atau informasi tentang fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, mereka disebut sebagai narasumber, informan, teman, atau guru, bukan sebagai responden. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive, artinya mereka dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang relevan dengan penelitian.

Sesuai dengan fokus penelitian ini, yakni untuk memperoleh data dan informasi mengenai kinerja Bursa Kerja Khusus dalam menyalurkan lulusan SMK Negeri di Kota Cimahi, serta sesuai dengan pertimbangan tertentu, maka partisipan yang akan dijadikan sumber data yakni yang berkaitan langsung dengan implementasi Bursa Kerja Khusus SMK yaitu Ketua BKK SMK Negeri 1 Cimahi, Ketua BKK SMK Negeri 2 Cimahi, Ketua BKK SMK Negeri 3 Cimahi, Alumni SMK Negeri 1 Cimahi, Alumni SMK Negeri 2 Cimahi dan Alumni SMK Negeri 3 Cimahi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aspek kelembagaan

a. Pendirian/legalitas Bursa Kerja Khusus (BKK)

Berdasarkan pedoman teknis Bursa Kerja Khusus (BKK), Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi, dan Lembaga Pelatihan Kerja berhak mendirikan BKK. Untuk mendirikan BKK, diperlukan pengajuan surat permohonan kepada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten atau Kota, sesuai dengan lokasi BKK yang akan dibentuk. Dalam hal ini BKK SMK mengajukan surat permohonan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Cimahi untuk mendapatkan Tanda Daftar sebagaimana yang tercantum

dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP-1907/PPTK-PKK/X/2018 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus, Pasal 3 Ayat 2, yang menyatakan: “Jika permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau 4, kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota akan menerbitkan surat tanda daftar.” Surat persetujuan pendirian BKK yang telah dikeluarkan akan tetap sah selama BKK terus menjalankan fungsinya secara aktif. Dengan demikian, secara legalitas, BKK SMK Negeri yang ada di Kota Cimahi telah mematuhi peraturan yang berlaku.

b. Struktur Organisasi dan Kondisi Kepengurusan

Menurut George R. Terry dan Leslite W. Rue (2019, hal. 70), Tahap pengorganisasian meliputi pengelompokan dan pengaturan kegiatan yang diperlukan, alokasi sumber daya manusia, serta pembagian wewenang untuk mencapai tujuan atau sasaran. Menurut George R. Terry, pelaksanaan pengorganisasian harus mengikuti beberapa prinsip penting, yaitu: objektivitas, pembagian tugas, penempatan tenaga kerja yang tepat, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, serta pelimpahan wewenang. Berdasarkan data penelitian, BKK SMK belum menerapkan 4 asas tersebut sebab dua dari tiga BKK tidak memiliki struktur organisasi. Menurut Jaelani (2021, hlm 38) Untuk menghindari tumpang tindih dalam pekerjaan serta ketidakjelasan tanggung jawab dan wewenang, perlu adanya struktur dan pembagian kerja yang jelas. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan.

Sebuah organisasi yang tidak memiliki pembagian tugas yang baik dalam tim dapat menghadapi masalah seperti konflik antar anggota. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tugas yang jelas untuk menghindari permasalahan tersebut. Namun, pembagian tugas yang efektif hanya terdapat di BKK SMK Negeri 1 Cimahi. Fenomena ini terjadi karena kurangnya SDM disekolah sehingga dalam pelaksanaannya, BKK SMK Negeri di Kota Cimahi juga melibatkan beberapa guru atau tenaga kependidikan yang dipilih oleh Ketua BKK dan bersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BKK.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Kerja, Pasal 34 Ayat (1), menetapkan bahwa hal tersebut tidak sesuai. Di dalamnya menjelaskan bahwa “BKK, sebagaimana dimaksud, harus memiliki paling sedikit personil yang menangani IPK, penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta perantara kerja”.

Selain tidak memiliki struktur organisasi, petugas BKK SMK belum seluruhnya melakukan pelatihan antar kerja dari Dinas Ketenagakerjaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP-1907/PPTK-PKK/X/2018 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus, Pasal 7 Ayat (3), yang menyatakan: “Personil BKK wajib mengikuti Bimbingan Teknis Antar Kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat, dinas provinsi, dinas kabupaten/kota, atau bekerja sama dengan instansi terkait lainnya”.

c. Sarana dan Prasarana BKK

Untuk memastikan kelancaran proses penempatan tenaga kerja, BKK memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan fasilitas yang lengkap sangat penting

dalam mendukung kegiatan tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa BKK SMK di Kota Cimahi telah memiliki sarana prasarana untuk mendukung proses penempatan tenaga kerja yaitu pelaksanaan rekrutmen. Penelitian Marifa, K (2020, hlm 5) di SMK Bidang Keahlian Pariwisata menunjukkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini selaras dengan temuan tersebut. Ruang BKK yang terpisah dari ruang BK sangat diperlukan, serta sarana lain seperti ruang konseling karir untuk membantu peserta didik dalam mendapatkan informasi karir. Kekurangan dalam sarana dan prasarana dapat menghambat kinerja BKK dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Saat ini, semua BKK di SMK Negeri Kota Cimahi belum dilengkapi dengan papan nama BKK. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP-1907/PPTK-PKK/X/2018 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus, Pasal 6 Ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) BKK yang telah menerima surat tanda daftar pendirian dari instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota harus memasang papan nama di depan kantor BKK tersebut.

Ayat (2) Papan nama tersebut harus berukuran 100 x 60 cm, dengan latar belakang putih, tulisan hitam, berlogo, dan mencantumkan nomor tanda daftar di bawahnya.

Papan nama yang mencantumkan nomor ijin pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) memiliki beberapa fungsi penting dalam menunjukkan legalitas BKK. Tanpa adanya papan nama yang mencantumkan nomor ijin pendirian, dapat menimbulkan keraguan mengenai legalitas BKK SMK Negeri di Kota Cimahi. Sebuah penelitian menjelaskan bahwa papan nama harus memperhatikan kenyamanan pembaca dan tidak mengganggu keindahan lingkungan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau perusahaan, karena papan nama yang baik mencerminkan profesionalisme dan keberadaan yang resmi (Negara, I, N, S. 2029, hlm 7)

d. Pembiayaan BKK

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan kegiatan BKK SMK didapatkan dari sekolah (APBS). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP-1907/PPTK-PKK/X/2018 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus, Pasal 9 Ayat (2), BKK tidak diperbolehkan mengenakan biaya penempatan kerja kepada pencari kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Jasa penempatan (recruitment fee) tidak boleh dipungut dari pencari kerja, kecuali untuk golongan dan jabatan tertentu yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-230/MEN/2003 tentang golongan dan jabatan tertentu yang dapat dikenakan biaya penempatan tenaga kerja.

Meskipun BKK tidak memungut biaya kepada pencari kerja, biaya yang ada sangat terbatas. Hal tersebut serupa dengan hasil laporan akhir penggunaan dana bantuan BKK SMK Negeri 5 Batam Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa keterbatasan biaya menyebabkan beberapa sekolah mengalami kendala dalam meningkatkan kerjasama dengan industri.

2. Aspek Kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK)

a. Pendaftaran dan Pendataan Pencari Kerja

BKK SMK Negeri di Kota Cimahi telah melaksanakan pendaftaran dan pendataan pencari kerja, serta menyebarkan informasi mengenai lowongan pekerjaan kepada lulusan yang sedang mencari pekerjaan melalui media sosial. Menurut Anura Iksan, P (2023, hal. 118), pemanfaatan teknologi informasi membuat proses pendataan menjadi lebih efektif dan efisien.

Penyebaran informasi yang dilakukan bersamaan dengan pendaftaran dan pendataan pencari kerja sudah baik dilihat dari tanggapan para alumni tentang informasi yang diberikan BKK. Kemudian dalam pelaksanaannya BKK SMK hanya melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan kepada lulusan sekolahnya. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP-1907/PPTK-PKK/X/2018 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus, Pasal 5 Ayat (2), dinyatakan bahwa: "BKK dilarang menyalurkan pencari kerja yang tidak berasal dari lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja yang bersangkutan".

b. Pendataan dan Pencarian Lowongan Kerja

Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK memiliki peran penting dalam menjembatani tamatan dengan pencari kerja. Dalam melaksanakan kegiatan pendataan lowongan pekerjaan, BKK perlu mengumpulkan informasi mengenai lowongan yang tersedia di dunia usaha dan industri. BKK SMK Negeri di Kota Cimahi menjalin kerja sama dengan berbagai dunia usaha dan industri untuk mempermudah pencarian informasi terkait lowongan pekerjaan.

Dalam pelaksanaannya, BKK SMK Negeri di Kota Cimahi menggunakan beberapa metode untuk memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan dari perusahaan seperti membangun jaringan dan hubungan, mengikuti job fair dan mengirim proposal. Hal tersebut selaras dengan artikel Kompas (Prastiwi, M & Ihsan, D. 2023) menjelaskan bahwa menjalin hubungan baik dengan alumni yang sudah bekerja dapat menjadi cara untuk mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan tempat alumni bekerja. Aktif mengikuti job fair dan bursa kerja, serta menghubungi perusahaan tempat pelatihan kerja (PKL) dapat membantu sekolah untuk mendapatkan informasi dari berbagai perusahaan sekaligus.

Umumnya, BKK lebih mengutamakan perusahaan atau pihak industri yang telah menjalin kerja sama dengan sekolah. Selanjutnya, lowongan pekerjaan yang diperoleh akan disebarluaskan kepada siswa dan alumni melalui media sosial yang dimiliki oleh BKK. Semakin banyaknya lowongan pekerjaan yang didata oleh BKK semakin banyak pula kesempatan para alumni untuk mendapatkan kesempatan bekerja.

c. Pemberian Bimbingan Kepada Pencari Kerja

Bimbingan karir merupakan upaya untuk membantu peserta didik dalam mengeksplorasi pilihan karir yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki (Amalia, R., Nufi, E. P., & Maydana, I. 2024, hlm 28). Bimbingan karir bertujuan untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi dunia kerja, memilih bidang atau jabatan yang sesuai, serta membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan peran yang dipilih dan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan di lapangan pekerjaan. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP-

1907/PPTK-PKK/X/2018 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus, Pasal 8 poin d, bimbingan harus diberikan kepada pencari kerja untuk membantu mereka memahami bakat, minat, dan kemampuan mereka, sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja atau untuk memulai usaha mandiri.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Sonia (2019, hlm 62) menjelaskan bahwa bimbingan karir memainkan peran krusial dalam membantu siswa mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Bimbingan ini memberikan dukungan dan arahan yang diperlukan untuk memahami pilihan karir, mengeksplorasi potensi diri, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan serta tuntutan dunia kerja yang akan dihadapi. Berpedoman pada penjelasan diatas, setiap tahunnya BKK SMK Negeri di Kota Cimahi melakukan bimbingan karir atau penyuluhan jabatan yang dapat diikuti oleh siswa kelas X sampai XII.

d. Penawaran dan Kerjasama Dengan Pihak Industri

Pada dasarnya, BKK tidak hanya menunggu kedatangan perusahaan ke sekolah, tetapi juga diizinkan untuk melakukan kunjungan ke mitra kerja guna mengecek adanya lowongan pekerjaan (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2018). Kegiatan penawaran dan upaya untuk menjalin kerja sama dengan industri dilakukan dengan berbagai cara, seperti kunjungan industri, pengajuan proposal, sounding saat pelaksanaan PKL, dan menjaga komunikasi dengan pihak industri. Terdapat dua tipe kerjasama industri dengan BKK, yaitu sistem kerjasam lepas/non MoU dan sistem kerjasama terikat/MOU. Hal ini mirip dengan temuan dalam penelitian M Emilya Waode & Rais Hidayat (2024, hlm 20), yang menunjukkan bahwa penyerapan lulusan di industri dilakukan melalui MoU dengan DU/DI tertentu, terutama dengan perusahaan besar seperti PT PLN, yang bersedia menerima siswa dengan prestasi baik.

e. Pelaksanaan Pameran Bursa Kerja (Job Fair) dan Kegiatan Sejenisnya

Job fair diadakan untuk memberikan kesempatan kepada para alumni untuk berinteraksi langsung dengan perusahaan-perusahaan pemberi kerja. Selain itu, acara ini juga berfungsi sebagai strategi penting dalam pengumpulan data alumni dalam rangka tracer study. Bagi pusat karir, job fair merupakan peluang untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan guna memahami kebutuhan mereka terhadap kompetensi alumni, serta mendapatkan informasi terbaru tentang jenis pekerjaan yang ditawarkan dan kompetensi yang diperlukan (Amalia, R. M., Adiwilaga, E. K., dkk. 2019, hlm 220).

Iksan Putra Anura (2023, hlm 120) menjelaskan bahwa kegiatan job fair juga memungkinkan perusahaan untuk menemukan kandidat yang paling cocok dengan kebutuhan mereka secara lebih efisien dan tepat waktu sehingga mempercepat proses keterserapan. Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa Job Fair memiliki peran penting dalam memasarkan lulusan, tetapi tidak semua BKK SMK di Kota Cimahi melaksanakan Job Fair secara rutin dan berkesinambungan.

f. Verifikasi, Penelusuran dan Kerjasama Alumni

Kegiatan verifikasi bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai lulusan yang telah bekerja, belum bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan. Dengan informasi ini, Bursa Kerja Khusus (BKK) dapat menjaga hubungan baik dengan lulusan dan memberikan dukungan kepada mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Proses

verifikasi dilakukan dengan meminta lulusan mengisi data tracer study secara online melalui Google Form yang dibagikan melalui WhatsApp. Selain itu, verifikasi juga dilakukan saat lulusan mengambil ijazah untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan terkini.

Melalui pendekatan ini, BKK dapat memantau perkembangan karir para lulusannya dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu lulusan dalam proses mencari pekerjaan. Dengan demikian, BKK dapat memastikan bahwa lulusannya memiliki akses yang lebih baik ke peluang kerja yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka serta dapat terus menjaga hubungan baik dengan para lulusannya.

Anis, Y., dkk (2024, hal. 93) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pelatihan tracer study merupakan strategi efektif yang dapat diterapkan oleh sekolah vokasi untuk meningkatkan evaluasi lulusan dan menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kegiatan ini memiliki sejumlah implikasi penting bagi kebijakan dan praktik pendidikan vokasi, serta memberikan kontribusi berharga terhadap pengembangan pendidikan vokasi secara keseluruhan.

Tracer study yang dilakukan terdiri dari dua versi yaitu tracer study yang diadakan oleh pemerintah dan tracer study dari sekolah. Berdasarkan data penelitian, hasil tracer study ketersediaan lulusan SMK Negeri di Kota Cimahi tercatat pada tahun ajaran 2023 adalah SMK Negeri 1 Cimahi 91%, SMK Negeri 2 Cimahi 82% dan SMK Negeri 3 Cimahi 84%. Hasil ini belum memenuhi 100% target pelaksanaan tracer study.

g. Pelaporan Kegiatan BKK

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP-1907/PPTK-PKK/X/2018 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus, Pasal 12, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bursa Kerja Khusus (BKK) setiap bulan, triwulan, dan tahunan harus dilaporkan kepada instansi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat. Selain itu, laporan tersebut juga harus disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Selain itu, laporan juga harus dikirimkan kepada instansi pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BKK SMK Negeri yang ada di Kota Cimahi melaporkan seluruh kegiatan penempatan kerja yang dilakukan BKK kepada Dinas Tenaga kerja setiap kurun waktu tiga bulan dan satu kali pelaporan kepada Kepala Sekolah bersamaan dengan laporan dari bidang Hubungan Industri Sekolah.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja BKK

1. Faktor Penghambat

Menurut data penelitian, beberapa faktor yang menghambat BKK dalam menyalurkan lulusan meliputi: keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), alumni, kesibukan sebagai guru, keterbatasan dana, sarana prasarana, tingginya UMR, kesulitan mencari mitra dan persaingan kerja. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Iksan Putra Anura (2023, hal. 121) Beberapa faktor yang menghambat BKK dalam menyalurkan lulusan, termasuk komunikasi yang kurang efektif dengan alumni yang belum mendapatkan pekerjaan dan ketidaksesuaian antara lowongan pekerjaan dengan kualifikasi lulusan. Hal ini berkontribusi pada kegagalan dalam

proses penyaluran lulusan. Dwi Lestiana (2019, hlm. 325) juga menemukan bahwa kendala utama bagi pengurus BKK dalam memasarkan lowongan pekerjaan secara langsung adalah mental dan sikap alumni. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana juga turut menghambat proses penyaluran lulusan.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah semua elemen yang dapat mendorong atau memberikan dampak positif terhadap setiap kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK). Faktor pendukung ini sangat penting karena dapat membantu mengoptimalkan proses penyaluran tenaga kerja dan meningkatkan ketercapaian tujuan BKK. Dalam penelitian ini diketahui bahwa faktor pendukung yang dimiliki oleh BKK dalam menyalurkan lulusan adalah stakeholder di sekolah, alumni, sarana prasarana dan keselarasan program studi. Dalam penelitian Lidinilah, M. (2022, hlm. 20), ditemukan bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan layanan BKK meliputi: (1) Motivasi tinggi peserta didik dan alumni dalam mengikuti bimbingan dan penyuluhan karena merasa sangat membutuhkannya. (2) Efektivitas layanan BAIK dalam memotivasi peserta didik untuk mendaftar ke berbagai perusahaan, meskipun seleksi sering dilakukan di luar daerah Sukoharjo. (3) Dukungan dari guru kelas dan wali kelas, yang merasa bangga saat peserta didik mereka mendapatkan pekerjaan meskipun belum lulus sekolah. (4) Dukungan sekolah terhadap strategi layanan BKK dengan menyediakan kesempatan dan dukungan untuk pengembangan yang lebih baik.

4. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BKK memainkan peran penting dalam menyalurkan lulusan ke dunia kerja melalui berbagai kegiatan seperti kerjasama dengan industri, pendataan pencari kerja, bimbingan, rekrutmen, job fair, dan penelusuran alumni, meskipun pelaksanaannya belum konsisten. Secara keseluruhan, kinerja BKK dinilai cukup baik dengan 53% lulusan berhasil ditempatkan, namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kelembagaan, struktur organisasi, dan sarana yang belum sepenuhnya memadai. Kegiatan BKK meliputi pendaftaran online, pelatihan karir, dan tracer study, namun pelaksanaan job fair dan tracer study masih kurang optimal. Faktor penghambat utama dalam kinerja BKK adalah keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana, serta rendahnya partisipasi alumni, sementara dukungan dari stakeholder dan alumni menjadi faktor pendukung.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. M., Adiwilaga, E. K., Bainus, A., & Hermawan, W. (2019). Bursa Kerja, Alumni dan Peluang Pekerjaan: Gambaran Kegiatan Unpad Job Fair 2019. *Proceeding Indonesian Carrier Center Network (ICCN) Summit 2019, 1(1), 216-220.*
- Amalia, R., Nufi, E. P., & Maydana, I. (2024). Inovasi Penggunaan Media Digital pada Layanan Bimbingan Karir dalam Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar di Era Society 5.0. *Anterior Jurnal, 23(1).*

- Angraini, A. M., Sari, R. M., & Fristiani, N. (2020). Implementasi Metode Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 1(2).
- Anis, Y., Listiyono, H., Wahyudi, E. N., & Mulyani, S. (2024). Pelatihan Tracer Study Siswa SMK-01 Tonjong Brebes Untuk Mengukur Lulusan Pendidikan Vokasi. *Servis: Jurnal Pengabdian dan Layanan kepada Masyarakat*, 2(2), 93-99.
- Anura. Iksan. P. (2023). Peran dan Manajemen Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 1 Kediri Dalam Meningkatkan Keterserapan Lulusan.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan No. 057/D5.6/KU/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengembangan Layanan BKK Tahun 2018.
- George R. Terry dan L.W. Rue. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jaelani. (2021). *Teori Organisasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik
- Marifa, K. (2020). Manajemen Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Pariwisata Dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Kerja. *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana*, 15(1).
- Moko, W., Basuki, A., Risanto, Y. 2021. *Manajemen Kinerja Teori dan Praktik*. Malang: UB Press.
- Munawar, Bubun. (2023). Kurangi Angka Pengangguran, Pemkot Cimahi Gelar Job Fair 2023. Diakses dari <https://limawaktu.id/news/kurangi-angka-pengangguran-pemkot-cimahi-gelar-job-fair-2023>
- Negara, I. N. S. (2019). Prinsip Ergonomi Pada Papan Nama Fakultas Seni Rupa Dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar. *Prabangkara: Jurnal Seni Rupa dan Desain*, 23(1), 6-10.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- Prastiwi, M & Ihsan, D. (2023). Cek 5 Cara Mencari Lowongan bagi Lulusan Baru. Diakses dari https://www.kompas.com/edu/read/2023/09/29/090600871/cek-5-cara-mencari-lowongan-bagi-lulusan-baru?page=all#google_vignette
- Rakhman, M. L., & Trihantoyo, S. (2020). Peran Hubungan Masyarakat Era Marketing 4.0 Dalam Meningkatkan Keterserapan Lulusan Program Keahlian Multimedia Di Smk Negeri 12 Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Volume*, 08(03)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>